

## Peringatan HKG PKK Ke-50 Tahun, Ketua II TP-PKK Kab Way Kanan Hadiri Acara Puncak Secara Virtual

Aftisar Putra - [WAYKANAN.INDONESIASATU.ID](http://WAYKANAN.INDONESIASATU.ID)

Mar 9, 2022 - 03:23



*Foto : Dokpim WK*

WAY KANAN - Ketua II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Way Kanan, Ny. Vorian Melita Saipul beserta jajaran menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-50

Tahun 2022 secara virtual di Kantor Dekranasda Kabupaten setempat, Selasa, (08/03/2022).

Kegiatan Video Conference (Vicon) tersebut diselenggarakan berdasarkan Surat Nomor : 010/Skr/PKK.Pst/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 Perihal Peringatan puncak Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-50 Tahun 2022 yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau.

Acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, Jenderal Polisi (Purn). Tito Karnavian, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E.,M.M, dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, Ny. Hj. Dewi Kumalasari Ansar beserta jajaran, selain acara yang bersifat seremonial, juga dilakukan berbagai kegiatan aksi nyata.

Kegiatan yang mengusung tema Puncak Peringatan "50 Tahun Gerakan PKK, Berbakti Untuk Bangsa Berbakti Untuk Sesama", acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-50 tahun tersebut diselenggarakan selama 2 hari mulai Tanggal 7 sampai dengan 8 Maret 2022, diisi dengan lokakarya Nasional dengan tema yang sama dengan tema Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2022.

Pada Acara Puncak tersebut diisi dengan acara Seremonial di Aula Wan Seni Beni yang sejalan dengan Launching Aplikasi Sistem Aplikasi Pos Pelayanan Terpadu (SIAP PANDU) yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Kepri, BKKBN dan Dinas Dukcapil Provinsi Kepri, dimana melalui Aplikasi SIAP PANDU, para Kader Posyandu akan dimudahkan dengan data yang terintegrasi secara digital se-Provinsi Kepri.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Kepala Daerah dapat memberdayakan keberadaan PKK, karena PKK merupakan mesin besar yang mampu bekerja hingga menjangkau keluarga sebagai komunitas terkecil dalam sistem kemasyarakatan.

"PKK merupakan mesin besar yang mampu bekerja hingga menjangkau keluarga sebagai komunitas terkecil dalam sistem kemasyarakatan," jelas Mendagri Tito Karnavian.

Lebih lanjut disampaikannya, "Dengan potensi tersebut, PKK menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mempercepat program pembangunan, dimana saat ini PKK telah banyak mendukung program pembangunan di bidang sandang, ketahanan pangan, percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan dan sebagainya," ungkap Mendagri.

Iya juga berharap kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat memberdayakan PKK melalui berbagai langkah, misalnya dengan memberikan hibah untuk mendukung program PKK. Selain itu, Pemda juga dapat melibatkan program PKK kedalam kegiatan yang dimiliki oleh OPD, seperti dilibatkan dalam kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan atau penanganan stunting.

Mendagri juga berharap agar pelibatan program tersebut dapat dilakukan sejak perencanaan penganggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui Plt.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mendagri juga telah memerintahkan agar saat mereviu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat melihat apakah ada program yang melibatkan PKK.

Dalam upaya lainnya, Pemerintah Daerah dapat mendorong para Perusahaan agar memberikan dana CSR atau bekerjasama dengan PKK dalam mendukung berbagai program kegiatan. Kepala Daerah juga memiliki kekuatan agar Perusahaan dapat memberikan dukungan tersebut. Mendagri juga menekankan, tanpa adanya berbagai dukungan Pemda, keberadaan PKK menjadi tidak maksimal.

"Disadari telah banyak Daerah yang bergerak mendukung PKK, pada gelaran Puncak Peringatan HKG PKK Ke-50 tahun ini agar dapat menjadi momentum bagi semua pihak terutama Kepala Daerah untuk semakin mendukung dan memberdayakan keberadaan PKK." tutup Mendagri.